

Peran Modul Perencanaan dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Integrasi Sistem Keuangan Desa

Mega Chrisna Prihandita

Universitas Islam Malang, megachrisna@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa yang berkualitas adalah hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian tentang kontribusi Modul Perencanaan dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap mutu perencanaan pembangunan desa masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Modul Perencanaan dalam meningkatkan mutu dokumen perencanaan desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modul Perencanaan berkontribusi pada peningkatan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, memperbaiki sistematika penyusunan dokumen, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaannya masih tergantung pada kemampuan aparatur desa dan mutu data yang ada. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang peran digitalisasi dalam perencanaan tata kelola pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan implikasi penting untuk penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan Siskeudes, dengan tujuan menciptakan perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Modul Perencanaan, Perencanaan Pembangunan Desa, Siskeudes, RPJMDes, RKPDes

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa adalah alat penting dalam pengelolaan pemerintahan desa, karena menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan, program, kegiatan, serta distribusi sumber daya pembangunan (Haryanto, 2021; Widodo & Hidayat, 2021). Kualitas perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki sasaran yang jelas, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Pada pemerintahan desa, kualitas perencanaan terlihat dari keselarasan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga semua tahap pembangunan dapat berlangsung secara terintegrasi dan akuntabel (Rahayu & Sari, 2023).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Penyusunan dokumen perencanaan sering kali tidak didukung oleh data yang cukup, sehingga program yang dirumuskan kurang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan belum sepenuhnya berjalan dengan mendalam dan masih cenderung bersifat administratif. Kondisi ini semakin sulit karena adanya keterbatasan kemampuan aparat desa dalam menyusun dokumen perencanaan, mengelola data pembangunan, serta mengoperasikan sistem informasi yang mendukung pengelolaan pemerintahan desa (Sutrisno & Wibowo, 2022). Akibatnya, keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan belum selalu dapat dicapai secara maksimal.

Dalam perspektif teori perencanaan pembangunan, kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi yang akurat, mendukung pengambilan keputusan, menjamin keterpaduan antarprogram, serta mendorong partisipasi para pemangku kepentingan. *Conyers* dan *Hills* menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif harus dirancang secara logis berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung oleh data yang akurat, dan memiliki hubungan yang

jelas antara tujuan, program, serta sumber daya yang digunakan. Sementara itu, pendekatan digital governance menempatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa (Kurniawan & Setiawan, 2021; Prasetyo & Nugroho, 2022).

Sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa, pemerintah telah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berfungsi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara terintegrasi. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah Modul Perencanaan yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes dengan cara yang lebih sistematis, terstruktur, dan selaras dengan dokumen penganggaran desa. Kehadiran modul ini diharapkan dapat mengatasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, meningkatkan kualitas data pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas dalam proses penyusunan program dan kegiatan desa.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas tata kelola. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes dapat meningkatkan keteraturan dalam administrasi, mempercepat pengelolaan keuangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Auliyah & Dunakhir, 2022; Bagiada & Hadi, 2023; Habriyanto et al., 2024; Hardianto et al., 2022; Natania Mega et al., 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan sistem informasi desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, dukungan dari lembaga, dan kualitas data yang digunakan (Wahyuni & Lestari, 2023; Yuliani & Firmansyah, 2024). Meskipun demikian, banyak penelitian yang masih menitikberatkan pada aspek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas desa, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis peran Modul Perencanaan terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang penelitian yang perlu dieksplorasi untuk memahami kontribusi modul tersebut dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi perencanaan melalui Modul Perencanaan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pembangunan desa. Namun, efektivitas penggunaannya masih perlu diteliti lebih dalam, terutama terkait dengan konsistensi dokumen perencanaan, kelengkapan informasi pembangunan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran Modul Perencanaan dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan desa; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan Modul Perencanaan dalam penyusunan dokumen pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Modul Perencanaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa berbasis digital, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Keuangan Desa untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui peran Modul Perencanaan Siskeudes dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Unit analisis penelitian adalah pemanfaatan Modul Perencanaan Siskeudes dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan desa terdiri atas Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Pendamping Desa, dan anggota BPD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara diintegrasikan dengan hasil observasi dan dokumen perencanaan desa untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang pelaksanaan Modul Perencanaan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan dengan informan lain. Triangulasi dokumen dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dan observasi dengan dokumen resmi desa, yaitu RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan berita acara musyawarah desa. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas dari temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Modul Perencanaan dalam Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Modul Perencanaan pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, terutama RPJMDes dan RKPDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, keberadaan modul tersebut memberikan dukungan kepada perangkat desa dalam merancang program pembangunan dengan cara yang lebih sistematis, terstruktur, dan terintegrasi dalam proses penganggaran desa. Temuan ini menunjukkan bahwa Modul Perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi digital, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu pemerintah desa menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, dan dokumen penganggaran. Integrasi ini mengurangi kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam program dan kegiatan yang sebelumnya sering terjadi dalam proses penyusunan dokumen secara manual.

Secara konseptual, mutu perencanaan pembangunan desa dapat dianalisis melalui sejauh mana dokumen perencanaan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, menyertakan program yang terukur, serta memiliki hubungan yang jelas dengan arah pembangunan desa. Dalam konteks penelitian ini, Modul Perencanaan berfungsi sebagai alat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Rahmawati & Yuniarti (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi desa dapat meningkatkan akurasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta mempermudah proses pengawasan administrasi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Valah et al (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan desa dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

2. Kontribusi Modul Perencanaan terhadap Konsistensi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

Berdasarkan hasil observasi dokumen dan wawancara, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kualitas perencanaan pembangunan desa setelah penerapan Modul Perencanaan. Peningkatan tersebut terlihat pada tiga aspek utama, yaitu konsistensi dokumen, kelengkapan substansi perencanaan, dan keterukuran program pembangunan.

Aspek Kualitas Perencanaan	Kondisi Sebelum Penggunaan Modul	Kondisi Setelah Penggunaan Modul
Konsistensi dokumen	Sering terjadi perbedaan antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Dokumen lebih sinkron dan saling terhubung
Kelengkapan dokumen	Beberapa komponen perencanaan belum terdokumentasi secara lengkap	Format dan komponen dokumen lebih lengkap
Keterukuran program	Indikator kegiatan belum dirumuskan secara jelas	Target dan indikator kegiatan lebih terukur
Transparansi informasi	Informasi perencanaan terbatas pada perangkat desa	Informasi lebih mudah diakses dan diverifikasi

Sumber: Data Diolah Peneliti

Data yang terdapat dalam Tabel 1. menunjukkan bahwa Modul Perencanaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan desa. Sistem ini mendukung perangkat desa dalam merumuskan indikator kegiatan yang lebih terperinci, sehingga memperlancar proses evaluasi program pembangunan. Selain itu, penggabungan data dalam sistem mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

3. Modul Perencanaan sebagai Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Modul Perencanaan berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Informasi mengenai program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran tercatat dengan lebih teratur, sehingga mempermudah dalam proses pencarian data dan verifikasi dokumen. Ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan pihak terkait menjelaskan dasar penyusunan program kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Dengan demikian, proses perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas kepada publik. Temuan ini menguatkan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan pemerintahan yang efektif, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks desa, penerapan Modul Perencanaan berkontribusi pada terciptanya proses pembangunan yang lebih transparan, karena setiap tahap perencanaan tercatat dengan jelas dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

4. Faktor Pendukung Implementasi Modul Perencanaan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Modul Perencanaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, dedikasi pemerintah desa dalam mengimplementasikan sistem digital menjadi elemen kunci yang mempengaruhi efektivitas penggunaan modul. Kedua, dukungan dari pendamping desa serta pemerintah daerah sangat membantu aparat desa dalam memahami cara kerja sistem secara operasional. Ketersediaan pedoman teknis dan pelatihan sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk mengoperasikan aplikasi dengan lebih optimal. Faktor-faktor ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan desa tidak hanya bergantung

pada kualitas sistem yang diterapkan, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya.

5. Faktor Penghambat Implementasi Modul Perencanaan

Selain berbagai manfaat yang didapatkan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan Modul Perencanaan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pemahaman teknis terkait perencanaan pembangunan desa. Selain itu, kualitas data desa yang belum sepenuhnya mutakhir juga memengaruhi ketepatan dalam merancang program pembangunan. Kendala lain yang ditemukan berkaitan dengan aspek teknis, seperti keterbatasan jaringan internet dan proses pembaruan sistem yang memerlukan penyesuaian dari pihak terkait. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan digital dalam pengelolaan desa memerlukan dukungan infrastruktur serta peningkatan kemampuan aparatur secara berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur teknologi.

6. Analisis Hubungan Modul Perencanaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat dipahami bahwa Modul Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Peran tersebut terlihat dari peningkatan konsistensi dokumen perencanaan, keteraturan dalam proses penyusunan program, kemudahan dalam pengendalian administrasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan Modul Perencanaan tidak terjadi secara otomatis. Efektivitas sistem sangat bergantung pada keterampilan individu dalam mengelola data, memahami proses perencanaan, serta memanfaatkan berbagai fitur yang ada dalam aplikasi. Dengan demikian, keterkaitan antara Modul Perencanaan dan mutu perencanaan pembangunan desa bersifat interaktif, di mana teknologi berperan sebagai alat pendukung yang efektivitasnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan organisasi yang memanfaatkannya. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa digitalisasi perencanaan desa melalui Modul Perencanaan Siskeudes dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur, terukur, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperkuat kualitas data desa agar sistem ini dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Modul Perencanaan dalam Siskeudes berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Pemanfaatan modul ini membantu pemerintah desa dalam menyusun dokumen RPJMDes dan RKPDes secara lebih sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Integrasi alur perencanaan di dalam sistem juga memungkinkan munculnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Namun demikian, efektivitas penggunaan Modul Perencanaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan. Desa yang memiliki pemutakhiran data yang baik serta perangkat yang memahami alur kerja sistem akan menghasilkan dokumen yang lebih akurat, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi perangkat desa dan lambatnya pembaruan data berpotensi

menurunkan kualitas dokumen perencanaan, meskipun sistem telah tersedia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya penguatan untuk mendorong optimalisasi peran Modul Perencanaan. Pertama, peningkatan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan teknis dan penguatan literasi perencanaan berbasis data. Kedua, penyediaan pendampingan berkelanjutan dari pendamping desa maupun pemerintah daerah agar proses pemanfaatan sistem tetap berjalan dengan baik. Ketiga, penguatan mekanisme musyawarah partisipatif untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas perencanaan pembangunan desa diharapkan semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah, A., & Dunakhir, S. (2022). Aplikasi Siskeudes sebagai perangkat pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pada Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 51–55.
- Bagiada, P. P., & Hadi, M. (2023). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 278–289.
- Habriyanto, H., Muthmainnah, & Huda, M. (2024). Analisis peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 133–145.
- Hardianto, W. T., Finambello, F. T. M., & Rifa'i, M. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditinjau dari evaluasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Governance: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(1), 53–64.
- Haryanto, S. (2021). Perencanaan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 25–37.
- Kurniawan, B., & Setiawan, A. (2021). Digital governance dalam pengelolaan pembangunan desa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 145–159.
- Natania Mega, K., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161.
- Prasetyo, R., & Nugroho, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. *Jurnal Governance*, 8(2), 98–110.
- Rahayu, N., & Sari, M. (2023). Kualitas perencanaan pembangunan desa dalam perspektif partisipatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 67–81.
- Rahmawati, S., & Yuniarti, D. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 44–58.
- Sutrisno, E., & Wibowo, H. (2022). Peran kapasitas aparatur desa terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 72–86.
- Valah, B., Rotzami, & Ardiansyah. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Harau

Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, 5(1), 315–329. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i1.5309>

Wahyuni, D., & Lestari, P. (2023). Integrasi sistem informasi desa dalam mendukung pembangunan berbasis data. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 201–214.

Widodo, J., & Hidayat, T. (2021). Good governance dalam pengelolaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 25(3), 245–258.

Yuliani, R., & Firmansyah, D. (2024). Transformasi digital pemerintahan desa dan peningkatan kualitas layanan publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1–15.